Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 4 No. 1 (2025) pp: 74-80
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Dampak Kebijakan Lumbung Pangan Nasional terhadap Ketahanan Pangan Lokal: Perspektif Masyarakat Adat Merauke

Robertus Pecamuya
Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Plotik Yaleka Maro Merauke Merauke
robertuspecamuya30@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kebijakan Lumbung Pangan Nasional (food estate) terhadap ketahanan pangan lokal dari perspektif masyarakat adat di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan desain studi kasus, penelitian ini menggali pengalaman komunitas adat Marind di wilayah Wasur, Sota, dan pesisir selatan Merauke yang terdampak langsung oleh proyek tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik berbasis coding kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan food estate telah menyebabkan gangguan signifikan terhadap sistem pangan lokal, termasuk hilangnya akses terhadap sumber pangan tradisional seperti ikan rawa, rusa, dan sagu. Selain itu, terjadi marginalisasi nilai-nilai pertanian adat serta ketimpangan distribusi sumber daya dan hasil produksi, di mana kelompok masyarakat adat kurang mendapat akses dibandingkan mitra binaan pemerintah. Mayoritas partisipan menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan atau pelaksanaan kebijakan, sehingga memunculkan persepsi negatif terhadap negara. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan kebijakan yang bersifat top-down berisiko mengabaikan aspek sosial, budaya, dan ekologis lokal, serta memperparah kerentanan pangan masyarakat adat. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pergeseran paradigma kebijakan pangan nasional menuju model yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berkeadilan, dengan melibatkan masyarakat adat sebagai aktor utama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini juga merekomendasikan studi lanjutan yang bersifat komparatif dan interdisipliner.

Kata Kunci : Kebijakan pangan; Masyarakat adat; Ketahanan pangan lokal; Food estate; Partisipasi komunitas

1. Latar Belakang

Kabupaten Merauke merupakan salah satu wilayah strategis di kawasan timur Indonesia yang memiliki peran penting dalam agenda nasional ketahanan pangan. Menurut [1] Wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang unik, dengan bentang alam datar dan subur, serta curah hujan yang cukup untuk mendukung aktivitas pertanian skala besar. Potensi inilah yang menjadikan Merauke sebagai lokasi utama dalam implementasi program Lumbung Pangan Nasional (*food estate*), sebuah kebijakan strategis pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan global dan meningkatkan produksi pangan domestik secara masif. Dalam kerangka tersebut, Merauke dijadikan sebagai model kawasan sentra produksi pangan berbasis modern dan mekanisasi pertanian.

Namun, di balik klaim produktivitas dan efisiensi tersebut, implementasi program *food estate* di Merauke menuai kritik dan kekhawatiran, khususnya dari kelompok masyarakat adat. Masyarakat adat Marind, menurut [2] yang merupakan komunitas asli di wilayah tersebut, memiliki ikatan yang erat dengan tanah, hutan, dan air sebagai sumber kehidupan dan identitas budaya. Tanah bagi masyarakat Marind bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi ruang hidup yang sarat nilai spiritual, historis, dan kekerabatan. Kebijakan transformasi lahan skala besar yang dilakukan tanpa konsultasi bermakna dengan masyarakat adat dikhawatirkan mengancam keberlangsungan hidup mereka secara sosial, ekonomi, dan ekologis.

Lebih jauh, [3] kebijakan yang menekankan aspek produksi pangan nasional kerap kali mengabaikan aspek ketahanan pangan lokal, terutama dalam hal ketersediaan dan akses terhadap sumber pangan tradisional. Pangan lokal seperti sagu, ubi, keladi, hasil perikanan air tawar, serta tanaman hutan yang selama ini menopang pola konsumsi masyarakat adat, secara perlahan tergantikan oleh tanaman pangan monokultur seperti padi dan jagung yang tidak sepenuhnya sesuai dengan konteks local [4]. Hilangnya ragam pangan lokal tidak hanya berdampak

pada dimensi gizi dan kesehatan masyarakat, tetapi juga mengikis sistem pengetahuan lokal yang telah diwariskan lintas generasi.

Dalam banyak kasus, menurut [5] pendekatan top-down dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam distribusi manfaat. Proyek *food estate* yang dijalankan oleh pihak luar, baik pemerintah maupun investor swasta, kerap kali meminggirkan peran masyarakat adat sebagai aktor utama dalam pengelolaan lahan. Akses masyarakat terhadap lahan semakin terbatas, dan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan sering kali bersifat simbolik. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan penting tentang sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjamin keadilan sosial dan kedaulatan pangan masyarakat setempat.

Di sisi lain, [6] pemerintah daerah juga dihadapkan pada dilema antara menjalankan amanat kebijakan pusat dengan menjaga keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat lokal. Kurangnya koordinasi lintas sektor, lemahnya kapasitas kelembagaan lokal, serta minimnya regulasi perlindungan hak-hak masyarakat adat semakin memperbesar risiko eksklusi sosial dalam pelaksanaan kebijakan pangan. Dalam konteks Merauke sebagai daerah otonomi khusus, persoalan ini menjadi semakin kompleks karena menyangkut relasi kuasa antara negara dan masyarakat adat Papua dalam kerangka desentralisasi asimetris.

Meskipun banyak studi telah dilakukan mengenai kebijakan ketahanan pangan, sebagian besar penelitian masih bersifat teknokratik dan kuantitatif, dengan fokus pada produksi, efisiensi lahan, dan teknologi pertanian [7]. Belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam dimensi sosial-budaya kebijakan tersebut, khususnya dari perspektif masyarakat adat yang terdampak langsung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan Lumbung Pangan Nasional terhadap ketahanan pangan lokal di Kabupaten Merauke, dengan menekankan pada perspektif, pengalaman, dan pengetahuan masyarakat adat sebagai aktor utama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kritis bagi perumusan kebijakan publik yang lebih inklusif, kontekstual, dan berkeadilan di kawasan perbatasan Indonesia Timur.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus [8], yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan Lumbung Pangan Nasional berdampak terhadap ketahanan pangan lokal dari perspektif masyarakat adat di Kabupaten Merauke. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas sosial, budaya, dan ekologis yang tidak dapat direduksi menjadi angka statistik semata. Lokasi penelitian difokuskan pada komunitas masyarakat adat Marind, yang tersebar di sejumlah kampung seperti Wasur, Sota, dan wilayah pesisir selatan Merauke, yang merupakan wilayah terdampak langsung oleh implementasi proyek food estate. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik utama, yaitu wawancara mendalam dengan tokoh adat, petani lokal, ibu rumah tangga, serta pemuda adat; observasi partisipatif terhadap aktivitas produksi dan konsumsi pangan masyarakat; serta studi dokumen terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah terkait ketahanan pangan dan pembangunan Kawasan. Wawancara dilaksanakan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang bagi partisipan dalam menyampaikan narasi mereka secara bebas, mendalam, dan sesuai dengan konteks kultural masing-masing. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik berbasis coding kualitatif [9]. Proses ini melibatkan identifikasi, kategorisasi, dan interpretasi terhadap tema-tema utama yang muncul dari narasi partisipan dan catatan lapangan. Proses coding dilakukan secara manual dan dibantu dengan perangkat lunak analisis kualitatif, untuk menjamin keterlacakan dan konsistensi interpretasi. Tema-tema seperti persepsi masyarakat terhadap perubahan lanskap pangan, peran tanah dalam struktur sosial adat, serta resistensi terhadap kebijakan negara menjadi fokus dalam proses analisis.

3. Hasil dan Diskusi

Kebijakan Lumbung Pangan Nasional atau *food estate* yang digagas pemerintah sebagai solusi ketahanan pangan nasional telah menyasar wilayah-wilayah adat di Papua, termasuk Merauke. Wilayah ini dikenal memiliki kekayaan ekologis dan budaya yang erat kaitannya dengan sistem pangan tradisional masyarakat adat, seperti komunitas Marind. Namun, perlu dicermati bagaimana kebijakan berskala besar ini berdampak terhadap ketahanan pangan lokal, khususnya dari sudut pandang masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada sumber daya alam dan kearifan lokal. Penelitian ini berfokus pada pengalaman, persepsi, dan respons masyarakat adat terhadap kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya memahami dinamika lokal di tengah pembangunan nasional.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.374
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tabel 1. Dampak Ekspansi Food Estate terhadap Ketahanan Pangan Tradisional Komunitas Marind di Distrik Sota dan Kurik

Aspek Analisis	Temuan Penelitian
Komunitas Terdampak	Komunitas adat Marind yang secara turun-temurun bergantung pada ekosistem hutan dan rawa untuk pemenuhan kebutuhan pangan tradisional.
Sumber Pangan Tradisional	Ikan rawa, rusa, sagu, dan aneka tanaman hutan non-budidaya yang memiliki nilai gizi dan nilai budaya tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Transformasi Lahan	Pembukaan besar-besaran hutan dan rawa untuk kepentingan proyek food estate mengakibatkan degradasi ekosistem alami dan kehilangan akses terhadap wilayah adat.
Perubahan Pola Akses Pangan	Lokasi perburuan dan pengambilan sagu yang dahulu mudah diakses kini telah dialihfungsikan menjadi lahan pertanian komersial berbasis monokultur.
Implikasi Ekologis	Gangguan terhadap keseimbangan ekologis, berkurangnya biodiversitas lokal, serta hilangnya habitat spesies penting bagi subsistensi komunitas.
Dampak Sosial-Budaya	Terjadi disrupsi terhadap kearifan lokal dan praktik konsumsi tradisional yang selama ini menjadi bagian integral dari identitas dan ketahanan budaya.
Ketergantungan Pangan Eksternal	Masyarakat mulai beralih ke pangan non-tradisional seperti beras industri, mie instan, dan produk olahan lain yang kurang bernilai gizi dan tidak berkelanjutan.
Risiko Jangka Panjang	Meningkatnya ketergantungan terhadap pasar luar, penurunan ketahanan pangan berbasis lokal, serta potensi konflik terkait klaim lahan dan hak akses.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspansi food estate di wilayah Sota dan Kurik telah memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan pangan tradisional masyarakat adat Marind. Pembukaan hutan dan lahan rawa untuk pertanian komersial telah mengganggu ekosistem alami yang selama ini menjadi sumber utama pangan seperti ikan rawa, rusa, sagu, dan tanaman hutan lainnya. Lokasi-lokasi perburuan dan pengambilan sagu yang dahulu mudah diakses kini telah berubah fungsi, mengakibatkan menurunnya ketersediaan pangan lokal dan terputusnya hubungan masyarakat dengan wilayah adat mereka. Akibatnya, terjadi pergeseran pola konsumsi ke arah pangan industri seperti beras, mie instan, dan makanan olahan lain yang tidak sesuai dengan pola hidup tradisional. Kondisi ini tidak hanya mengancam ketahanan pangan, tetapi juga mengikis nilai-nilai budaya serta meningkatkan ketergantungan terhadap sistem pangan eksternal yang kurang berkelanjutan.

Tabel 2. Dampak Ekspansi Food Estate terhadap Nilai dan Praktik Pertanian Adat Komunitas Marind

Aspek	Temuan Penelitian
Sistem Pertanian Tradisional	Sebelumnya berbasis komunal, mengutamakan rotasi alami dan keberlanjutan, dengan proses musyawarah dan penghormatan terhadap alam.
Perubahan yang Terjadi	Diperkenalkannya sistem pertanian monokultur berbasis intensifikasi dan penggunaan input eksternal menggantikan pola lokal.
Praktik Adat yang Terpinggirkan	Ritual pembukaan lahan, musyawarah kampung, metode penanaman adat, dan upacara panen mulai ditinggalkan atau tidak dijalankan.
Dampak terhadap Pengetahuan Lokal	Terjadi penurunan transmisi pengetahuan antargenerasi karena berkurangnya ruang untuk praktik pertanian berbasis budaya.
Kekhawatiran Tokoh Adat	Hilangnya praktik pertanian adat dianggap sebagai ancaman terhadap kelestarian nilai-nilai leluhur dan jati diri masyarakat Marind.
Risiko Sosial Budaya	Potensi terjadinya krisis identitas budaya, keterasingan generasi muda dari akar tradisinya, serta hilangnya sistem nilai yang selama ini menopang kehidupan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspansi program food estate telah berdampak signifikan terhadap nilai dan praktik pertanian adat komunitas Marind. Sistem pertanian tradisional yang sebelumnya berbasis komunal, berlandaskan prinsip keberlanjutan dan rotasi alami, mulai tergantikan oleh pendekatan monokultur yang intensif dan bergantung pada input eksternal. Praktik-praktik adat seperti musyawarah kampung, penanaman berdasarkan kearifan lokal, serta ritual panen semakin terpinggirkan. Hal ini memicu kekhawatiran di kalangan tokoh adat terhadap hilangnya transmisi pengetahuan antar generasi dan potensi pudarnya identitas budaya yang selama ini melekat kuat dalam sistem pertanian tradisional Marind.

Tabel 3. Persepsi Masyarakat Adat Marind terhadap Kebijakan Food Estate di Wilayah Adat Sota dan Kurik

Aspek Analisis	Temuan Penelitian
Partisipasi Masyarakat	Mayoritas informan menyatakan tidak dilibatkan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan proyek food estate.
Transparansi Informasi	Informasi terkait tujuan, skala proyek, serta dampak jangka panjang tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.374
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Awal Pengetahuan tentang Proyek	Sebagian besar warga baru mengetahui adanya proyek setelah alat berat dan pekerja masuk ke wilayah adat.
Persepsi Umum terhadap Kebijakan	Persepsi masyarakat cenderung negatif; kebijakan dianggap tidak relevan dengan kebutuhan lokal dan mengabaikan kearifan tradisional.
Pandangan terhadap Negara	Kebijakan dipandang sebagai bentuk dominasi negara atas tanah ulayat, mengabaikan hak masyarakat adat sebagai pemilik sah secara historis dan kultural.
Dampak Sosial-Budaya	Masyarakat merasa terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan dan kehilangan kontrol atas tanah dan sumber daya yang menjadi identitas kolektif.

Persepsi masyarakat adat Marind terhadap kebijakan food estate di wilayah Sota dan Kurik umumnya negatif. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pelibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan proyek, serta minimnya transparansi informasi terkait tujuan, skala, dan dampak kebijakan tersebut. Banyak warga baru mengetahui proyek setelah alat berat masuk ke wilayah adat mereka. Kebijakan ini dipandang sebagai bentuk dominasi negara atas tanah ulayat yang mengabaikan hak historis dan kultural masyarakat adat, sehingga menimbulkan rasa keterpinggiran serta hilangnya kontrol terhadap tanah dan sumber daya yang menjadi bagian penting dari identitas kolektif mereka.

Komunitas adat Marind di Distrik Sota dan Kurik merupakan entitas sosial-ekologis yang secara historis memiliki ketergantungan tinggi terhadap ekosistem hutan dan rawa sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan pangan. Sumber daya seperti ikan rawa, rusa, sagu, dan aneka tanaman non-budidaya tidak hanya berfungsi sebagai asupan gizi, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai kultural, spiritual, dan identitas kolektif masyarakat. Ketahanan pangan dalam konteks komunitas ini bersifat holistik, yang tidak dapat dipisahkan dari struktur pengetahuan lokal dan praktik ekologis berkelanjutan yang telah diwariskan secara turun-temurun [10]. Oleh karena itu, sistem pangan tradisional mereka bukan hanya soal subsistensi, melainkan bagian dari sistem kehidupan yang kompleks dan integral. Namun demikian, pelaksanaan proyek *food estate* di wilayah ini telah menimbulkan transformasi spasial dan ekologis yang signifikan. Kebijakan ini mendorong ekspansi pertanian komersial melalui pembukaan lahan besar-besaran yang mencakup hutan adat dan kawasan rawa, yang sebelumnya menjadi wilayah perburuan dan pengambilan sagu. Proses ini berimplikasi pada hilangnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam strategis, serta menimbulkan degradasi ekosistem yang mengancam keberlanjutan hayati [11]. Alih fungsi lanskap adat menjadi lahan monokultur berbasis komoditas mencerminkan paradigma pembangunan yang tidak inklusif terhadap nilai ekologis dan kultural lokal, serta cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kondisi tersebut telah memicu disrupsi terhadap pola konsumsi dan sistem distribusi pangan masyarakat adat [12]. Dengan menurunnya ketersediaan pangan lokal, masyarakat terdorong untuk mengonsumsi pangan industri seperti beras, mie instan, dan produk olahan lainnya. Perubahan ini tidak hanya menggeser preferensi konsumsi, tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas gizi dan meningkatnya ketergantungan terhadap rantai pasok pangan eksternal [13]. Di sisi lain, sistem pangan industri yang masuk ke wilayah adat kerap tidak mempertimbangkan aspek keterjangkauan, keberlanjutan, dan kesesuaian dengan struktur sosial lokal, sehingga justru memperlemah otonomi pangan komunitas. Lebih jauh lagi, intervensi pembangunan yang tidak memperhitungkan keberadaan sistem sosial-budaya lokal telah menciptakan kerentanan baru bagi masyarakat adat. Praktik kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan dan konsumsi pangan kini mengalami delegitimasi, seiring dengan dominasi sistem produksi modern yang menyingkirkan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan. Situasi ini tidak hanya mengikis identitas kultural dan solidaritas sosial, tetapi juga memperbesar risiko konflik atas penguasaan lahan dan penghilangan hak-hak ulayat [14]. Dalam perspektif jangka panjang, kebijakan food estate yang minim partisipasi dan sensivitas sosial berpotensi memperparah marginalisasi masyarakat adat serta menghambat terwujudnya ketahanan pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Ekspansi proyek *food estate* di wilayah Sota dan Kurik telah membawa perubahan signifikan pada sistem pertanian tradisional masyarakat adat Marind. Sebelumnya, sistem pertanian yang dijalankan berbasis komunal, mengandalkan rotasi alami lahan dan dijalankan dengan prinsip keberlanjutan. Pertanian bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari sistem sosial dan spiritual yang dijaga melalui musyawarah adat serta penghormatan terhadap siklus alam [15]. Namun, masuknya proyek berbasis intensifikasi pertanian modern memperkenalkan praktik monokultur dan penggunaan input eksternal seperti pupuk dan pestisida kimia. Pergeseran ini tidak hanya mengubah teknik bertani, tetapi juga menggantikan logika sosial dan ekologis lokal dengan pendekatan teknokratis yang tidak sejalan dengan karakter wilayah dan budaya setempat. Dampak nyata dari perubahan sistem ini adalah terpinggirkannya berbagai praktik dan ritual adat yang dahulu menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan pertanian. Menurut [16] proses pembukaan lahan secara adat yang melibatkan doa dan persembahan, musyawarah kampung untuk menentukan jenis tanaman, serta upacara panen yang menghubungkan

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.374
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

manusia dengan leluhur dan alam kini mulai ditinggalkan. Hal ini terjadi bukan karena masyarakat menolak warisan budaya mereka, melainkan karena ruang pelaksanaannya telah digantikan oleh mesin, tenaga kerja luar, dan sistem birokratis yang tidak mengenal simbolisme adat. Akibatnya, sistem pertanian adat yang selama ini memperkuat kohesi sosial mulai kehilangan relevansinya di mata generasi muda.

Lebih jauh, [17] hilangnya ruang untuk praktik pertanian berbasis budaya berdampak pada menurunnya transmisi pengetahuan antargenerasi. Pengetahuan lokal tentang jenis tanaman hutan, rotasi lahan, dan waktu tanam berbasis tanda-tanda alam tidak lagi menjadi bagian dari pengalaman belajar generasi muda. Pengetahuan tersebut secara perlahan terpinggirkan karena digantikan oleh model pelatihan teknis modern yang tidak mengakomodasi kearifan lokal. Hal ini menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan sistem sosial-budaya masyarakat Marind, karena pengetahuan lokal bukan sekadar informasi praktis, melainkan juga identitas kolektif yang diwariskan dari leluhur. Para tokoh adat menyuarakan kekhawatiran yang semakin menguat seiring tergerusnya praktik pertanian adat. Bagi mereka, hilangnya praktik ini bukan hanya kehilangan metode bertani, melainkan hilangnya cara hidup dan hubungan spiritual dengan tanah. Proyek *food estate*, meskipun membawa teknologi dan sumber daya baru, dinilai sebagai bentuk intervensi luar yang memutus kontinuitas sejarah dan budaya lokal. Risiko jangka panjangnya adalah terjadinya krisis identitas, keterasingan generasi muda dari akar tradisinya, serta hilangnya sistem nilai yang selama ini menopang kehidupan kolektif masyarakat Marind. Dalam konteks ini, [18] pembangunan yang tidak memperhitungkan dimensi kultural dapat menjadi instrumen peminggiran yang sistemik terhadap komunitas adat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat adat Marind dalam perencanaan dan implementasi kebijakan *food estate* di wilayah Sota dan Kurik sangat minim. Mayoritas informan menyatakan bahwa mereka tidak pernah diajak berdiskusi atau diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat terkait proyek tersebut. Tidak adanya konsultasi ini mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah dalam mengakui dan menghormati hak partisipatif masyarakat adat atas wilayah dan masa depan mereka sendiri. Hal ini, [19] bentuk pengabaian terhadap prinsip *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)* yang seharusnya menjadi standar dalam setiap intervensi pembangunan di wilayah adat. Kurangnya transparansi informasi menjadi masalah krusial lainnya. Informasi mengenai tujuan kebijakan, skala proyek, dan potensi dampak jangka panjang terhadap kehidupan sosial dan lingkungan masyarakat tidak disampaikan secara terbuka. Sebagian warga bahkan baru mengetahui keberadaan proyek setelah alat berat dan para pekerja masuk ke wilayah adat mereka. Situasi ini menimbulkan kejutan sosial sekaligus ketidakpercayaan terhadap pihak-pihak pelaksana proyek. Ketidakterbukaan tersebut bukan hanya melanggar prinsip tata kelola pembangunan yang baik, tetapi juga menunjukkan adanya praktik *top-down* yang mengesampingkan partisipasi warga sebagai pemilik sah wilayah tersebut.

Persepsi masyarakat terhadap kebijakan *food estate* pada umumnya bersifat negatif. Proyek dianggap tidak relevan dengan kebutuhan lokal dan mengabaikan kearifan tradisional dalam pengelolaan lahan dan sumber daya alam. Skema produksi komersial yang diusung *food estate* tidak sejalan dengan pola konsumsi dan praktik pertanian masyarakat adat yang berbasis pada keberlanjutan dan keseimbangan ekologis [20]. Ketidaksesuaian ini tidak hanya menimbulkan penolakan secara kultural, tetapi juga memperbesar potensi konflik agraria dan sosial antara negara dan masyarakat adat. Lebih jauh, kebijakan *food estate* dipandang sebagai bentuk dominasi negara atas tanah ulayat yang selama ini dijaga dan dikelola oleh komunitas adat secara turun-temurun. Masyarakat merasa dimarjinalkan dalam proses pengambilan keputusan dan kehilangan kontrol atas sumber daya yang menjadi bagian dari identitas kolektif mereka. Dampak sosial-budaya yang ditimbulkan tidak dapat dianggap sepele karena menyangkut pergeseran nilai, erosi identitas, dan potensi disintegrasi komunitas adat. Oleh karena itu, kebijakan ini dinilai belum mampu menciptakan keadilan sosial dan justru memperparah ketimpangan struktural yang telah lama dialami masyarakat adat di wilayah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan lumbung pangan *(food estate)* di wilayah Sota dan Kurik belum memberikan manfaat yang merata bagi seluruh kelompok masyarakat. Ketimpangan paling mencolok terlihat pada akses terhadap sumber daya pertanian seperti pupuk, bibit unggul, dan alat pertanian modern. Sumber daya tersebut umumnya disalurkan kepada kelompok tani binaan atau pihak luar yang telah bermitra secara resmi dengan pemerintah. Sementara itu, kelompok masyarakat adat yang tidak terafiliasi secara formal sering kali terpinggirkan dalam distribusi bantuan. Hal ini memperlihatkan adanya pola eksklusi yang sistemik, [21] di mana kelompok-kelompok lokal tidak mendapatkan kesempatan yang adil untuk terlibat dalam proses produksi yang berlangsung di atas tanah adat mereka sendiri. Di sisi lain, distribusi hasil pertanian dari proyek *food estate* juga tidak memperhatikan kebutuhan pangan masyarakat lokal. Sebagian besar hasil panen disalurkan ke luar daerah atau ke pasar komersial nasional, mengikuti logika pasar dan target produksi nasional. Kebijakan distribusi semacam ini mengabaikan konteks lokal dan berkontribusi pada kelangkaan pangan yang sesuai dengan pola konsumsi komunitas adat Marind. Akibatnya, masyarakat mengalami defisit pangan lokal [22], meskipun aktivitas pertanian berskala besar berlangsung secara intensif di wilayah adat mereka.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.374
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ketimpangan dalam akses dan distribusi ini secara langsung berdampak pada menurunnya ketahanan pangan komunitas adat. Ketika masyarakat tidak memiliki kontrol terhadap produksi maupun distribusi hasil pertanian, maka kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dan berkelanjutan turut tergerus. Proyek *food estate* yang pada awalnya diharapkan menjadi solusi atas krisis pangan justru menciptakan sumber baru kerentanan, terutama bagi kelompok masyarakat adat yang memiliki hubungan historis dan kultural yang kuat dengan tanah dan sumber daya alam di sekitarnya.Kondisi ini semakin memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap sistem distribusi pangan nasional yang tidak selalu menjamin keterjangkauan, keberlanjutan, maupun kesesuaian dengan budaya konsumsi lokal. Komunitas adat pada akhirnya menjadi konsumen pasif dari sistem pangan yang dibentuk dari luar, tanpa pelibatan dan pengakuan terhadap kebutuhan serta kearifan lokal [23]. Dalam konteks tersebut, kebijakan *food estate* perlu dievaluasi secara menyeluruh agar dapat mengakomodasi keadilan distribusi manfaat serta menjamin keberlangsungan hidup masyarakat adat yang selama ini menjaga keseimbangan ekologis wilayahnya.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan Lumbung Pangan Nasional di Merauke telah menimbulkan perubahan signifikan terhadap sistem ketahanan pangan lokal masyarakat adat, khususnya suku Marind. Dampak yang paling nyata adalah terganggunya akses terhadap sumber pangan tradisional, terpinggirkannya nilai dan praktik pertanian adat, serta munculnya ketimpangan dalam distribusi hasil pangan. Selain itu, masyarakat menunjukkan persepsi negatif terhadap kebijakan ini karena minimnya keterlibatan mereka dalam proses perencanaan dan implementasi. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan yang bersifat top-down cenderung mengabaikan dinamika sosial-budaya lokal dan berisiko menciptakan konflik serta memperparah kerentanan pangan komunitas adat.Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam kebijakan pangan nasional agar lebih partisipatif dan kontekstual, khususnya di wilayah adat. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat adat sebagai subjek aktif melalui konsultasi yang bermakna, penghormatan terhadap hak ulayat, serta integrasi pengetahuan lokal. Meski memberikan wawasan penting, penelitian ini terbatas pada ruang lingkup wilayah dan jumlah partisipan, serta belum menggali perspektif aktor kebijakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, studi lanjutan disarankan mencakup analisis komparatif antar wilayah adat dan eksplorasi relasi kuasa antara negara, masyarakat, dan korporasi melalui pendekatan interdisipliner.

Referensi

[1] Y. Zhao and Q. Feng, “Identifying spatial and temporal dynamics and driving factors of cultivated land fragmentation in Shaanxi province,” *Agric. Syst.*, vol. 217, p. 103948, 2024.
[2] R. Datta, R. Singha, and M. Hurlbert, “Indigenous land-based perspectives on environmental sustainability: learning from the Khasis indigenous Community in Bangladesh,” *Sustainability*, vol. 16, no. 9, p. 3678, 2024.
[3] A. Kozielec, J. Piecuch, K. Daniek, and L. Luty, “Challenges to food security in the Middle East and North Africa in the context of the Russia–Ukraine Conflict,” *Agriculture*, vol. 14, no. 1, p. 155, 2024.
[4] T. H. L. Le, P. Kristiansen, B. Vo, J. Moss, and M. Welch, “Understanding factors influencing farmers’ crop choice and agricultural transformation in the Upper Vietnamese Mekong Delta,” *Agric. Syst.*, vol. 216, p. 103899, 2024.
[5] B. K. Sumari, N. Pauline, and E. Bwanduruko Mabhuye, “Integrating Bottom-up and Top-down Approaches in Tanzania’s Climate Change Adaptation Planning: Exploring Their Impact on Adaptive Capacity in Adaptation Projects,” *J. Dev. Stud.*, pp. 1–18, 2024.
[6] S. Chen, K. Jia, and K. N. Chan, “When blame avoidance meets transparency: local governments’ bandwagon strategy in environmental information disclosure in China,” *Local Gov. Stud.*, vol. 51, no. 1, pp. 69–89, 2025.
[7] K. Gagné and S. Chostak, “Climate change beyond technocracy: citizenship and drought practices in the Indian Himalayas,” *J. Peasant Stud.*, vol. 51, no. 5, pp. 1141–1163, 2024.
[8] S. Klingberg, R. E. Stalmeijer, and L. Varpio, “Using framework analysis methods for qualitative research: AMEE Guide No. 164,” *Med. Teach.*, vol. 46, no. 5, pp. 603–610, 2024.
[9] W. Liu, “The cognitive basis of thematic analysis,” *Int. J. Res. Method Educ.*, vol. 47, no. 3, pp. 277–287, 2024.
[10] M. Mallick, P. K. Singh, and R. Pandey, “Harvesting resilience: Tribal home-gardens as socio-ecological solutions for climate change adaptation and sustainable development in a protected area,” *J. Clean. Prod.*, vol. 445, p. 141174, 2024.
[11] I. Ahakwa and E. A. Tackie, “Natural resources as a double-edged sword towards ecological quality: Can environmental regulations and green human capital rectify the adverse impacts?,” *J. Clean. Prod.*, vol. 457, p. 142436, 2024.
[12] N. Trott and M. E. Mulrennan, “‘Part of Who We Are…’: A Review of the Literature Addressing the Sociocultural Role of Traditional Foods in Food Security for Indigenous People in Northern Canada,” *Societies*, vol. 14, no. 3, p. 34, 2024.
[13] R. de Sousa, L. Bragança, M. V da Silva, and R. S. Oliveira, “Challenges and solutions for sustainable food systems: The potential of home hydroponics,” *Sustainability*, vol. 16, no. 2, p. 817, 2024.
[14] A. S. N. Syaban and S. Appiah-Opoku, “Unveiling the Complexities of Land Use Transition in Indonesia’s New Capital City IKN Nusantara: A Multidimensional Conflict Analysis,” *Land*, vol. 13, no. 5, p. 606, 2024.
[15] M. P. Whelan, “Agroecology’s moral vision,” *Agric. Human Values*, vol. 41, no. 2, pp. 413–426, 2024.
[16] C. Syam, Y. O. Olendo, J. A. Dewantara, and E. F. Rahmani, “Oral literature and social identity of the Dayak Kanayatn: the extinction of oral literature in the midst of contemporary cultural trends,” *Cogent Arts Humanit.*, vol. 11, no. 1, p. 2376785, 2024.
[17] O. L. Malapane, N. Chanza, and W. Musakwa, “Transmission of indigenous knowledge systems under changing landscapes within the vhavenda community, South Africa,” *Environ. Sci. Policy*, vol. 161, p. 103861, 2024.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.374
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

[18] G. Katarzyna, "Colonial shadows–a systematic review of the Xavante health transformation," *Int. J. Equity Health*, vol. 24, no. 1, p. 81, 2025.
[19] K. Quail, D. Green, and C. O'Faircheallaigh, "Large-scale renewable energy developments on the indigenous estate: How can participation benefit Australia's First Nations peoples?," *Energy Res. Soc. Sci.*, vol. 123, p. 104044, 2025.
[20] M. A. Acevedo-Ortiz *et al.*, "Nature-Based Solutions for Conservation and Food Sovereignty in Indigenous Communities of Oaxaca," *Sustainability*, vol. 16, no. 18, p. 8151, 2024.
[21] L. S. Grinshpan, S. Eilat-Adar, D. Ivancovsky-Wajcman, R. Kariv, M. Gillon-Keren, and S. Zelber-Sagi, "Ultra-processed food consumption and non-alcoholic fatty liver disease, metabolic syndrome and insulin resistance: A systematic review," *JHEP Reports*, vol. 6, no. 1, p. 100964, 2024.
[22] M. Adnan *et al.*, "Known and unknown environmental impacts related to climate changes in Pakistan: an under-recognized risk to local communities," *Sustainability*, vol. 16, no. 14, p. 6108, 2024.
[23] D. Dushkova and O. Ivlieva, "Empowering communities to act for a change: A review of the community empowerment programs towards sustainability and resilience," *Sustainability*, vol. 16, no. 19, p. 8700, 2024.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.374
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)